

PENDIDIKAN ISLAM DI PAKISTAN

Samdani

Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia

Email: h.samdani1969@gmail.com

Abstract

The educational problem that occurs in Pakistan is that there are statements that identify some religious education institutions/madrasahs that are involved in terrorist movements. Meanwhile in Indonesia, there are also issues that identify the same thing as what happened in Pakistan. Another problem that is almost the same as in Indonesia is that there are still many children dropping out of school in Pakistan as well as in Indonesia, even though there is a law that regulates compulsory education for children but the state has not done much to serve the mandate of the law. there is punishment for parents who do not carry out compulsory education as mandated by each compulsory education law both in Pakistan and Indonesia.

Keywords: *Islamic Education, Pakistan.*

Abstrak

Problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan adalah adanya senyalemen yang mengidentifikasi sebagian lembaga pendidikan Agama/Madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris. Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasi hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Problematika lainnya yang hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah di Pakistan demikian pula halnya dengan di Indonesia, padahal ada undang-undang yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang undang tersebut terbukti tidak adanya *punishment* bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing undang-undang wajib belajar baik di Pakistan dan demikian pula di Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan Islam, Pakistan.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai hamba dihadapan Khaliq-nya dan juga sebagai Khalifatu fil ardh (pemelihara) pada alam semesta ini. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus (peserta didik) dengan kemampuan dan keahliannya yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ketengah lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan memiliki dampak besar terhadap jiwa manusia. Jika melihat ke sejarah bangsa kapan pun ingin mengalahkan orang lain bangsa dulu menduduki sistem pendidikan dan kurikulum dari negara-negara yang menduduki. Melalui pendidikan di negara mana pun mempersiapkan generasi mereka sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama mereka. Jika generasi tidak memakai jalur yang benar maka mereka akan berbeda

dengan cara-cara yang mereka temukan di akses mudah. Setiap negara memiliki satu agama karena itu harus ada hanya satu bentuk pendidikan. Sebuah negara memiliki cara yang berbeda dan tingkat pendidikan menyebutkan bahwa negara tidak ditetapkan agama dan budaya.

Salah satunya Negara Pakistan sedang mengalami banyak masalah seperti terorisme, kemiskinan, ketidakamanan, sektarianisme, etnis, sementara dan bigotries regional dan banyak lainnya. Semua masalah ini karena kurangnya kesadaran dan toleransi yang dikembangkan karena buta huruf.

Namun dalam fenomena Pakistan pendidikan terus jauh tertinggal pada setiap tingkat pembuatan kebijakan pembangunan. Partai politik sebagian besar sejarah menyalahkan hubungan internasional menekankan kemerdekaan dimulai hanya setelah kebijakan miskin mereka, mereka mengklaim kedatangan bangsa asing tidak memberikan ruang untuk berpikir secara menyeluruh tentang masalah-masalah sosial. Sekarang kegiatan pemerintah mengembangkan berbagai sejarah panjang atas kegagalan implementasi kebijakan yang benar untuk pendidikan untuk semua massa atas dasar kesetaraan dan kualitas.

Artikel ini ini membahas, sejarah singkat tentang pendidikan Islam yang ada di Pakistan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk meningkatkan pendidikan walaupun hanya sedikit.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini adalah literatur dengan mengumpulkan referensi seperti artikel jurnal, buku dan lainnya untuk dianalisis sebagaimana kajian dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Tentang Pakistan

Pakistan muncul sebagai negara Republik Islam pada tanggal 14 Agustus 1947 Negara Ini memiliki luas sekitar 796,095 Sq Kilometer. Pakistan terdiri dari empat provinsi: Punjab, North West Frontier Provinsi, Balochistan dan Sindh dan beberapa unit penyatuan yang meliputi Islamabad Modal Wilayah (ICT), Wilayah Kesukuan Federal (FATA) dan Wilayah Utara (Fana). Islamabad adalah ibukota Pakistan, yang terletak di bagian utara negara di bagian bawah dari Margalla Hills dekat Rawalpindi, adalah kota yang direncanakan dengan baik, yang dibangun di awal 1960-an. Bahasa nasional adalah Urdu. Sejumlah bahasa daerah juga berbicara di berbagai bagian negeri. Media pendidikan adalah Urdu namun bahasa Inggris terus untuk digunakan dalam pendidikan tinggi dan perguruan tinggi profesional, terutama dalam ilmiah dan teknis bidang. Bahasa Inggris digunakan secara luas untuk hukum dan lainnya resmi bisnis, komersial di negeri ini. Sekitar 97 persen dari orang Muslim.

Pakistan adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia. Etnis pakistan berasal dari lima kelompok yakni: Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch serta Muhajir (Imigran berbahasa Urdu dan India sebelum perpecahan). Mayoritas orang Pakistan (97%) adalah Muslim. Sedangkan non muslim termasuk orang Kristen dan Hindu dan Persi. Kelompok muslim 10 % - 15 % yaitu syiah Istna 'Asya'ariyah yang terdiri dua belas Imam. Sekte Syi'ah termasuk Isma'illiyah, kebanyakan terdapat di Karachi, wilayah barat laut Gilgit, dan Bohoras, sedangkan markas spritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas besar kaum Muslimi yaitu Sunni. Pakistan

menganut Mazhab Hanafi meskipun minoritas kecil pengikut Mazhab Hambali (Ajid Thohir, 2012).

Bahasa Urdu adalah sebagai bahasa umum masyarakat Pakistan dan merupakan bahasa baru yang lahir akibat akumulasi etnik dan percampuran berbagai pengaruh budaya dan bahasa, terutama Persia, Turki, India dan Arab sejak abad ke-13 M di sekitar wilayah-wilayah Afghanistan, Pakistan, Banglades dan India sekarang. Kesultanan Mughal, tampaknya salah satu hegemoni politik yang paling bertanggung jawab pada kurun abad ke-16 M akan kepentingan bahasa Urdu ini, sebagai manifestasi dari kekuatan soaial-budaya di India yang hendak mengidentifikasikan diri dan mencoba membedakan dirinya dan kekuatan Shafawiyah di persia dan Utsmaniyah di Anatoli Turki. Secara dinamis pengaruh sufisme tampaknya semakin mengukuhkan posisi bahasa sebagai salah satu bahasa Islam, terutama dalam mengisi dan mengembangkan kelembutan cita rasanya dalam berbagai santra yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa Urdu, yang kesemuanya telah mencerminkan akan kualitas dan kepadatan makna secara filosofis dan alegoris dari bahasa ini (Sayyid Husain Nasr, 1993).

Negara Pakistan Sekarang, terjadi akibat pemisahan dengan pemerintahan India pada 14 Agustus 1947, sejak awal abad ke- 19, Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Secara integral fenomena tersebut berkait erat dengan perjuangan kaum Muslimin India kemudian sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut umat Islam menentukan sendiri nasib dalam pembentukan wilayah merdeka. Dan Pakistan adalah satu-satunya negara yang unik diantara negara-negara Muslim yang lahir pada abad ke-20 dimana dalam landasan dasarnya didirikan atas nama Islam.

Berkaitan dengan pendidikan yang ada di Pakistan, memiliki dampak besar terhadap jiwa. Salah satunya, Pakistan mengalami banyak masalah seperti terorisme, kemiskinan, ketidakamanan, sektarianisme, etnis dan bigotries regional dan banyak lainnya. Semua masalah ini karena kurangnya kesadaran dan toleransi yang dikembangkan karena buta huruf. Karena itu pendidikan Pakistan terus jauh tertinggal pada setiap tingkat pembuatan kebijakan pembangunan. partai politik sebagian besar sejarah kami menyalahkan hubungan internasional menekankan kemerdekaan dimulai hanya setelah kebijakan miskin mereka, mereka mengklaim ketegangan asing tidak memberikan ruang untuk berpikir secara menyeluruh tentang masalah-masalah sosial. Sekarang kegiatan pemerintah mengembangkan berbagai sejarah panjang atas kegagalan implementasi kebijakan yang benar untuk pendidikan untuk semua massa atas dasar kesetaraan dan kualitas (<http://abdulbarialhikmh.blogspot.co.id/>).

Dinamika Kelembagaan/Sistem Kelembagaan

Sejak kemerdekaan, upaya telah dilakukan untuk mengaitkan sistem pendidikan dengan kebutuhan Semua Konferensi Pendidikan diselenggarakan pada tahun 1947 sesuai arahan pendiri Pakistan Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Dia menyediakan pedoman dasar untuk pengembangan masa depan pendidikan dengan menekankan interalia, bahwa sistem pendidikan harus sesuai dengan jenius rakyat kita, konsonan dengan budaya, sejarah kita dan menanamkan tertinggi rasa kehormatan, integritas, tanggung jawab, dan pelayanan tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. Hal ini juga harus menyediakan pengetahuan teknis dan

ilmiah untuk membangun kehidupan ekonomi kita. Ini diikuti oleh penunjukan berbagai komisi, yang menyampaikan laporan mereka secara berkala.

Pendidikan di Pakistan diawasi oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Pakistan serta pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah federal sebagian besar membantu dalam pengembangan kurikulum, akreditasi dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan.

Sistem pendidikan di Pakistan dibagi menjadi lima tingkatan; *Primary / primer* sampai kelas satu sampai lima; *Middle/ tengah*, kelas enam sampai delapan; *High/menengah* sampai sembilan dan sepuluh yang mengarah ke Sekolah Menengah ; *Certificate atau SSC*); *Intermediate/ tinggi*, kelas sebelas dan dua belas yang mengarah ke *Higher Secondary* atau Sekolah Sertifikat atau HSC dan *Program dan universitas* terkemuka sarjana dan gelar sarjana (Peter Blood, ed. 2010).

Adapun tahapan pendidikan formal terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tersier, Pendidikan Kuarter. Pendidikan formal yaitu pendidikan dasar hanya 87 % dari anak-anak Pakistan dalam menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Pendidikan pra sekolah di Pakistan untuk berusia 3-5 tahun dan biasanya terdiri dari tiga tahap yaitu kelompok Bermain, Taman Kanak dan TK yang disebut ' *KG ' atau ' Prep '* .

Pendidikan Seks di sekolah menengah masuk dalam kurikulum pendidikan pemerintah. Delapan disiplin ilmu yang diajarkan pada sekolah formal yakni: Urdu, bahasa Inggris, matematika, seni, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, Islamiyat dan terkadang studi komputer (tergantung ketersediaan laboratorium komputer) . Bahasa Punjabi, Sindhi, Pashto dan lain-lain merupakan bahasa provinsi dan regional diajarkan di masing-masing provinsi, khususnya di sekolah-sekolah bahasa menengah.

Beberapa lembaga memberikan instruksi dalam bahasa asing seperti Turki, Arab, Persia, Perancis dan Cina. Bahasa pengantar tergantung pada sifat dari lembaga itu sendiri, apakah itu sebuah sekolah Inggris, menengah atau sekolah menengah Urdu. Pada tahun 2009, Pakistan menghadapi tingkat kehadiran sekolah dasar net untuk kedua jenis kelamin dari 66 persen. Sosok di bawah perkiraan rata-rata dunia 90 persen (UNESCO Institute for Statistics. 2016).

Pendidikan di Pakistan sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi publik sehingga pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak sesuai dengan pendapatan dan alokasi dana pemerintah minim terhadap pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan yang lebih rendah seperti sekolah dasar menderita di bawah kondisi seperti kelas berpenghasilan rendah tidak dapat menikmati subsidi dan pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, Pakistan memiliki salah satu tingkat terendah melek huruf di dunia dan yang terendah di antara negara-negara sumber daya komparatif dan situasi sosial-ekonomi (Rasool Memon, Ghulam, 2007).

Problematika Pendidikan Islam di Pakistan

Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian republik islam Pakistan. Oleh sebab itu, Pakistan adalah Negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran agama Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam kehidupan modern termasuk bidang pendidikan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pakistan yaitu kebijakan *non co education* sebab *non co education* dipandang bertentangan dengan konsep islam, namun pendidikan untuk wanita secara modern juga diberikan. Didirikannya lembaga *The Pakistan Girls Guindes Association* (PGGA). Sejak kemerdekaan Pakistan, ia menunjukkan bahwa pemerintahan memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Lembaga ini dibentuk sebagai proyek peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kaum wanita.

Berkaitan dengan Madrasah di Pakistan menjadi topik perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Madrasah dianggap sebagai 'biang keladi' pertumpahan darah diantara sekte-sekte yang ada di Pakistan. Anggapan ini bukannya tidak beralasan, sejak dua dekade yang lalu, tepatnya pada akhir 70an dan awal 80an ketika revolusi Iran sampai sekarang terjadi pergolakan anti syiah semakin gencar di gaungkan oleh kalangan madrasah sunni Deobandi (Sohail Mahmoud 1995). Sedangkan Ahli Hadith dalam rangka membendung pengaruh syiah di Pakistan, dan tidak sedikit nyawa melayang dalam tiap-tiap perkelahian diantara dua sekte ini (Katja Riikonen dalam Journal Pakistan Security Research Unit Brief No: 2 yang berjudul "*Sectarianism in Pakistan: A Destructive Way of Dealing with Difference*").

Ketika zaman berperangan Afghanistan-Uni-soviet, madrasah bukan hanya saja tempat generasi muda belajar dan menimba ilmu dari kitab-kitab turath, akan tetapi madrasah juga melatih para santrinya untuk bagaimana menggunakan senjata dan training-training jihad. Madrasah-madrasah yang berorintsikan jihad tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, khususnya di *North Western Frontier Province (NWFP)* yang mempunyai perbatasan langsung dengan Afghanistan.

Adanya fenomena yang terjadi di Pakistan ini, mengakibatkan kurikulum madrasah harus dirubah dengan memasukan pelajaran umum, seperti komputer dan Bahasa Inggris. Pada awalnya banyak para maulana yang tidak mentaati himbawan dari Musharraf tersebut, karena takut kalau anak didik mereka terpengaruh dengan gaya pendidikan ala barat. Pro dan kotra terjadi dimana-mana. Sehingga wacana reformasi madrasah ini tidak hanya dibincangkan di kalangan para intelektual, akan tetapi hal ini menjadi perbincangan yang hangat di parlemen Pakistan juga. Melihat himbawan awal yang tidak begitu digubris oleh pemimpin-pemimpin madrasah, akhirnya pemerintah mengancam akan menutup madrasah-madrasah yang illegal dan memulangkan pelajar-pelajar asing yang belajar di Pakistan. Aksi dan ancaman ini keluar setelah bom bunuh diri meledak pada tanggal 7-7-2005 di stasiun kereta api bawah tanah di London.

Kurikulum di Pakistan

Kurikulum di Pakistan mencakup kombinasi dari delapan program termasuk pilihan, seperti Biologi, Kimia, dan Fisika Komputasi. serta mata kuliah wajib seperti Matematika, Bahasa Inggris, Urdu, Islamiat dan Studi Pakistan. Karena adanya tekanan dan desakan kuat dari para pemuka agama, pemerintah Pakistan akhirnya setuju memasukkan kembali bab-bab yang membahas tentang sejarah Islam, al-Quran dan sunnah dalam kurikulum pendidikan di wilayah North West Frontier Province (NWFP). Keputusan ini disambut gembira oleh pemuka agama di wilayah Pakistan yang langsung berbatasan dengan Afghanistan itu.

Menteri penerangan NWFP, Asif Iqbal mengatakan keputusan pemerintah itu merupakan kemenangan moral bagi mereka. Sementara itu, menteri pendidikan pemerintah

federal pakistan Letnan Jenderal Javed Ashraf Qazi dalam keterangan menyatakan permintaan pemerintah NWFP untuk memasukkan sejarah islam, al-Quran dan sunnah dalam kurikulum pendidikan di wilayah itu sah menurut hukum (<http://taqimsenjer-anakrantau.blogspot.com/2011/03/pendidikan-di-pakistan.html/>).

Ada dua jenis program Sarjana di Pakistan: Pass atau Honors. Lulus gelar membutuhkan dua tahun studi dan mahasiswa biasanya membaca tiga mata pelajaran opsional seperti Kimia atau Ekonomi. Di samping jumlah yang hampir sama dari mata kuliah wajib seperti Studi Pakistan dan Inggris. Gelar Honours membutuhkan tiga atau empat tahun studi. Mahasiswa biasanya mengkhususkan diri dalam bidang studi pilihan, seperti Biochemistry (BSc Hons. Biokimia). Sebagian besar program gelar Master memerlukan pendidikan dua tahun. Master of Philosophy dengan gelar M. Phil tersedia di sebagian besar mata pelajaran dan dapat dilakukan setelah melakukan Masters. Doctor of Philosophy dengan gelar PhD. M. Phil dan pendidikan PhD di Pakistan membutuhkan minimal dua tahun studi .

Pakistan terjadi diskriminasi gender dalam pendidikan antara rumah tangga termiskin tetapi tidak ada di antara rumah tangga kaya . Di antara kritik lain wajah sistem pendidikan Pakistan adalah ketimpangan gender di tingkat pendaftaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir beberapa kemajuan telah dibuat dalam berusaha untuk memperbaiki masalah ini. Ada perbedaan besar, partisipasi anak laki-laki dengan anak perempuan di Pakistan. Menurut data UNESCO, pendaftaran sekolah dasar untuk anak perempuan berdiri di 60 persen dibandingkan dengan 84 persen untuk anak laki-laki. Angka partisipasi sekolah menengah berdiri di tingkat yang lebih rendah dari 32 persen untuk perempuan dan laki-laki 46 persen. Kehadiran di sekolah reguler bagi siswa perempuan diperkirakan mencapai 41 persen sedangkan untuk siswa laki-laki adalah 50 persen.

Kualitas pendidikan di Pakistan memiliki kecenderungan menurun, salah satunya disebabkan oleh kekurangan guru dan laboratorium tidak memadai, kurikulum yang rusak, rendahnya kualitas guru, kecurangan dalam ujian dan ruang kelas yang penuh sesak. Namun, upaya berada di jalan molding kurikulum untuk memenuhi kebutuhan nasional (Ishfaq Ahmad (1998-11-21).

Pendidikan di Pakistan sangat dipengaruhi oleh agama. Sebagai contoh, sebuah studi guru sains Pakistan menunjukkan bahwa banyak menolak evolusi berdasarkan alasan keagamaan. Namun, kebanyakan guru Pakistan diterima atau mempertimbangkan kemungkinan evolusi organisme hidup, walaupun hampir semua Pakistan guru sains menolak evolusi manusia karena mereka percaya bahwa' manusia tidak berevolusi dari kera. "Meskipun banyak guru menolak evolusi manusia," semua setuju bahwa' tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan Islam pada umumnya”.

Pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori yakni: Quranic School, Mosque Primary School dan Madrasah (Uzma Anzar, 2003). *Pertama* adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran. Tempat biasanya di masjid-masjid atau mushalla desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas. Ada yang pagi, siang dan sore. Ustadz yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut. *Kedua* sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun keatas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah Zia-ul-Haq pada tahun 80an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan disebagian tempat di Pakistan.

Selain belajar Al-quran mereka juga diajarkan oleh imam masjid setempat mata pelajaran bahasa urdu dan matematika. Namun pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah gulung tikar. Sekarang jumlah Mosque Primary School diseluruh Pakistan sekitar 25.000 buah sekolah. *Dan yang terakhir adalah* madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Alquran seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren hifzul Alquran. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal Al-quran 30 juz sebelum belajar materi-materi lain. Karena al-quran merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama.

Ada lima aliran besar pemikiran di madrasah Pakistan yaitu Deobandi, Barelwi, Ahli Hadith, Salafi dan Syiah. Tiap-tiap aliran pemikiran ini mempunyai metode pembelajaran yang berbeda. Tapi, Deobandi dan Barelwi adalah dua pemikiran yang paling dominan diseluruh madrasah Pakistan.

Sistem Pendidikan di Pakistan

Sistem pendidikan Pakistan adalah mirip dengan struktur sistem pendidikan di Amerika Serikat dan banyak negara lain. Sejak tahun 1973 Konstitusi diadopsi, pemerintah federal Pakistan telah memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja antara lima dan 16 tahun, meskipun hanya sekitar 66 persen anak-anak Pakistan pergi ke sekolah dari pertama melalui kelas delapan dan hanya 30 persen pergi ke sekolah dari sembilan melalui kelas 12. Persentase ini jauh lebih kecil daripada empat negara Asia Selatan lainnya, Bangladesh, India, Nepal dan Sri Lanka (<http://www.masterstudies.co.id/Pakistan/>)

Setelah kelas 12, sistem pendidikan Pakistan memiliki dua tingkat. Gelar Sekolah Sistem Pendidikan adalah mirip dengan sistem perguruan tinggi Amerika. Bangsa ini memiliki 1.238 derajat perguruan tinggi dengan 205 dimulai sejak tahun 2008, menurut [Menteri Pakistan Keuangan](#). Kelas 15 dan seterusnya adalah bagian dari sistem pendidikan Universitas, yang mencakup 132 universitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan tinggi telah masuknya madrasah, sekolah Islam yang fokus pada mengajar siswa, kebanyakan orang miskin, mata pelajaran agama Quran dan lainnya. Ada sekitar 40.000 madrasah di Pakistan.

Pakistan adalah suatu bangsa yang beragam yang 60 bahasa digunakan di negara ini. Kelas diajarkan dalam banyak bahasa daerah maupun bahasa nasional dan resmi yaitu Inggris dan Urdu. Bahasa Inggris umumnya bahasa yang digunakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan universitas.

Sistem perjenjangan pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil keputusan komisi pendidikan nasional tahun 1959, yaitu pendidikan dasar, usia 6 sampai 11 tahun terdiri atas tingkat I sampai V, jadi pendidikan dasar ditempuh selama 5 tahun. Sekolah lanjutan tingkat pertama usia 12 sampai 15 tahun, terdiri atas tingkat VI sampai VII sedangkan sekolah menengah atas usia 16 sampai 18 tahun, terdiri atas tingkat IX dan X, jenjang ini memiliki tiga jenis sekolah yaitu sekolah umum, sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi, sekolah kejuruan dan tehnik khusus untuk jenjang perguruan tinggi. Sejak pemisahannya dengan India tahun 1947, Pakistan hanya memiliki satu universitas yaitu Universitas Punjab di

Lahore. Mata kuliahnya adalah agama sebagai mata kuliah dasar umum. Setelah berdirinya Pakistan kajian tentang islam meningkat pesat. Universitas Punjab mendirikan sebuah Departemen Islamiyat pada tahun 1950. Setelah itu berdiri berbagai perguruan tinggi lainnya, seperti universitas Sind, membuka fakultas sejarah dan kebudayaan islam pada awal tahun 1950-an. Pada tahun 1963 sebuah lembaga pendidikan didirikan lagi. Yang semula Madrasah lalu diubah menjadi Jami'ah Abasiyah. Dalam hal kurikulumnya lembaga ini dipengaruhi oleh universitas Al-Azhar, Mesir.

Pada tahun 1980, Islamabad didirikan universitas islam internasional yang berupaya menyatukan sistem pendidikan keagamaan dan umum. Sangat dimungkinkan bahwa ide munculnya universitas Islam Internasional yang berarti Integraten curriculum yang diilhami oleh hasil konferensi pertama sedunia tentang pendidikan islam di Makkah pada tahun 1977 (<http://inmuchlis.blogspot.com/2012/02/perbandingan-pendidikan-di-negara.html/>)

Kebijakan dan Tujuan Sistem Pendidikan di Pakistan

Laporan Komisi Nasional Pendidikan menikmati posisi aneh dalam sejarah reformasi pendidikan. Ada beberapa komisi dan pernyataan kebijakan sampai dengan 1973. Pada tahun 1973 pemerintahan demokratis sipil datang dengan konstitusi 1973 yang ketentuan bahwa negara harus: Mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam, Memajukan dengan perawatan khusus dan ekonomi kepentingan pendidikan daerah tertinggal, Menghapus buta huruf dan wajib menyediakan pendidikan sekunder dan gratis dalam minimum, Membuat dan profesional pendidikan teknis tersedia secara umum dan lebih tinggi, Pendidikan secara merata diakses oleh semua berdasarkan prestasi, Kemungkinan orang-orang dari bidang yang berbeda, Melalui pendidikan, pelatihan, pertanian dan pengembangan industri, dan metode lain untuk berpartisipasi penuh dalam segala bentuk kegiatan nasional termasuk ketenagakerjaan dalam jasa, dan menjamin partisipasi penuh dari perempuan dalam semua bidang kehidupan nasional.

Tujuan yang disebutkan di atas selalu diikuti dengan berbagai dokumen kebijakan yang diumumkan oleh selanjutnya pemerintah yang datang ke distrik dari waktu ke waktu. Setiap kebijakan menekankan pada universalisasi pendidikan dasar dan ilmu pendidikan kualitas pendidikan penurunan ketimpangan fasilitas pendidikan.

Dalam sistem pendidikan formal, ada beberapa tahap, yang diilustrasikan dalam diagram seperti yang dijelaskan secara singkat di bawah ini:

Pendidikan formal

1. Pra Sekolah Dasar: Pra pendidikan dasar adalah fungsional dan dikelola di sekolah-sekolah melalui luar negeri. Sekolah umum menyediakan-dasar pendidikan anak usia sebagai bagian dari proses sosialisasi. siswa yang menghadiri kelas pra-primer disebut Kachi.
2. Sekolah Dasar: Tahapan ini terdiri dari lima kelas IV dan mendaftar anak anak usia 5-9 tahun.
3. Tengah Sekolah: sekolah menengah ini adalah tiga tahun lamanya dan terdiri dari kelas VI, VII dan VIII Kelompok umur 10-12 tahun.
4. Sekolah Tinggi: Anak-anak sekolah menengah tinggal selama dua tahun di kelas IX dan X. Dewan Menengah dan Pendidikan Menengah melakukan pemeriksaan.

5. Pendidikan Menengah Tinggi: Tahap sekunder lebih tinggi dianggap sebagai bagian dari pendidikan perguruan tinggi. Menengah Pendidikan Tinggi terdiri dari kelas XI ke XII. Selama dua tahun menginap dalam siklus pendidikan, seorang mahasiswa pada usia 16 tahun dalam tahap ini dapat memilih untuk pendidikan umum, pendidikan profesional atau pendidikan teknis. Menurut 1979 Kebijakan Pendidikan, semua sekolah itu harus ke Sekolah Menengah yang lebih tinggi.
6. Pendidikan Tinggi: Untuk mendapatkan gelar, 4 tahun pendidikan tinggi. Dalam rangka untuk memperoleh gelar Master diperlukan waktu 2 tahun. Sebuah gelar doktor membutuhkan 3 tahun studi.
7. Profesional dan Teknis Pendidikan: Lama pendidikan pasca sekunder bervariasi di teknis dan profesional bidang. Diploma politeknik adalah program tiga tahun. Seorang sarjana dalam kedokteran (MBBS) membutuhkan 5 tahun studi setelah tahap peralihan (12 tahun sekolah). Untuk gelar sarjana baik dalam dan kedokteran hewan rekayasa perlu 4 tahun.
8. Pendidikan madrasah: Berdampingan dengan sistem pendidikan modern ada juga agama sistem pendidikan, yang menyediakan pendidikan Islam. Lembaga ini memiliki sendiri manajemen sistem tanpa campur tangan baik dari pemerintah provinsi atau federa. Upaya telah dilakukan oleh pemerintah hadir untuk membawa madrasah dalam arus utama dalam Reformasi Sektor Pendidikan.

Pendidikan Non-formal

Ada jutaan orang di Pakistan yang tidak memiliki akses ke formal sistem pendidikan. Tidaklah mungkin bagi sistem formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari berkembang pesat populasi. Pendidikan Dasar Sekolah skema telah diperkenalkan untuk mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Skema ini sangat biaya-efektif. Non-formal sekolah dibuka di daerah-daerah dimana sekolah formal tidak tersedia. Pemerintah menyediakan gaji guru dan bahan ajar sedangkan masyarakat menyediakan gedung sekolah/ruang.

Ujian biasanya diadakan setiap tahun, yang merupakan kriteria utama untuk mempromosikan para siswa untuk kelas yang lebih tinggi atau untuk mempertahankan mereka di kelas yang sama. Di kelas utama, pemeriksaan dilakukan oleh sekolah masing-masing. Namun, pada akhir tahun kelima tahap utama pemeriksaan publik diselenggarakan oleh departemen pendidikan untuk promosi ke depan kelas.

Di Pakistan, ada 90 Sekolah Tinggi Pendidikan Dasar yang menawarkan 'pelatihan guru program untuk Sertifikat Pengajaran Dasar (PTC) dan Sertifikat dalam Pengajaran (CT) untuk sekolah guru. Untuk guru sekolah menengah, ada 16 Sekolah Tinggi Pendidikan, menawarkan lulusan gelar pendidikan dan ada departemen pendidikan di 9 universitas yang melatih guru-guru di tingkat master. Hanya ada 4 institusi yang menawarkan layanan guru dalam training pelatihan.

Pendidikan Swasta

Keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan adalah mendorong. Survei Biro Statistik (1999-2000) menunjukkan bahwa ada 36.096 pendidikan swasta lembaga-lembaga di Pakistan. Telah diamati bahwa sebagian besar sekolah-sekolah swasta pilih kurikulum mereka sendiri

dan buku teks, yang tidak sesuai dengan sekolah umum. Sebagian besar sekolah adalah menggunakan Bahasa Inggris Sedang yang menarik orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut.

Kebijakan Pendidikan Nasional 1998-2010 yang diusulkan itu akan ada badan pengatur di tingkat nasional dan propinsi untuk mengatur kegiatan dan kelancaran fungsi pribadi dikelola sekolah dan institusi pendidikan tinggi melalui peraturan dan aturan yang berlaku. Menyiapkan lembaga teknis swasta harus didorong. Sesuai hibah harus disediakan untuk mendirikan lembaga pendidikan oleh sektor swasta di pedesaan daerah atau daerah perkotaan miskin melalui Yayasan Pendidikan. Di daerah pedesaan, sekolah harus didirikan melalui skema kemitraan swasta-publik. Pemerintah tidak hanya menyediakan bebas tanah untuk membangun sekolah, tetapi juga menanggung pada sebagian besar biaya konstruksi dan manajemen. fasilitas pinjaman Liberal harus diperluas ke lembaga pendidikan swasta dengan lembaga keuangan (<http://ainazra.blogspot.co.id/2015/09/sistem-pendidikan-islam-di-pakistan-dan.html>).

Perbedaan Pendidikan Islam di Indonesia

Secara yuridis formal di Pakistan ada undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar bagi anak antara usia 5-16 tahun. *Pasal 25 -A Konstitusi Pakistan mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak-anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun. " Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum.*

Bagi bangsa Indonesia dikenal dengan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berikut: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mel 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun.

Jenjang pendidikan dasar dan menengah di Pakistan dan di Indonesia tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah sekolah dasar di Pakistan hanya berlangsung 5 tahun, satu tahun lebih cepat dibandingkan dengan di Indonesia. Hal yang menarik dari Pakistan adalah adanya bentuk-bentuk pendidikan informal. Kalau di Indonesia, pendidikan informal hanya berupa pendidikan keluarga, maka di Pakistan setidaknya ada empat jenis pendidikan informal, yaitu: Kursus pendidikan dan ajaran islam, Kelompok penanggulangan bencana, Kursus keaksaraan dan teknologi, Kursus keterampilan hidup.

Hal menarik lainnya dari pendidikan di Pakistan adalah pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam pendidikan di Pakistan. Sekitar Sembilan macam pemanfaatan teknologi dan informasi untuk pendidikan, yaitu: Intel teach program dan portofolio tentang internet untuk guru dan siswa, Intel teach in service progame, Skill for success course, Getting started course, Essential course, Thinking with technology course, Advanced online course, Leadership forum dan Pre service program.

Hal menarik dari pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pendidikan tersebut adalah thinking with technology course. Artinya, masyarakat Pakistan tidak hanya menjadi pemakai teknologi tetapi bagaimana berpikir dengan teknologi (<http://arhamjf.blogspot.co.id/2014/12/makalah-perbandingan-pendidikan-islam.html>).

Administrasi dan Pengawas Struktur dan Operasi

Menurut Konstitusi Pakistan (1973), Pemerintah Federal dipercayakan tanggung jawab untuk kebijakan, perencanaan, dan promosi fasilitas pendidikan dalam penyatuan unit. Tanggung jawab ini selain keseluruhan kebijakan, koordinasi dan konsultasi otoritas, jika tidak, pendidikan adalah subjek provinsi. Departemen Pendidikan Federal mengelola institusi pendidikan yang terletak di wilayah ibukota federal.

Universitas terletak di berbagai propinsi dikelola oleh pemerintah provinsi, tetapi secara eksklusif didanai oleh pemerintah federal melalui Komisi Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Federal dipimpin oleh Menteri Pendidikan. Yang paling pegawai negeri senior di Departemen Pendidikan adalah Sekretaris dibantu oleh Sekretaris Bersama dan Pendidikan Bersama Penasehat sayap masing-masing. Ada 6 sayap di Kementerian Federal Pendidikan dan sayap masing-masing dipimpin oleh Joint Pendidikan Advisor.

Pendidikan provinsi dikepalai oleh Menteri Pendidikan. Pegawai negeri yang bertanggung jawab atas departemen adalah Pendidikan Provinsi Sekretaris. Provinsi itu dibagi lagi menjadi distrik untuk tujuan administrasi. Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten adalah Distrik Eksekutif Officer (EDO).

Angka putus sekolah SD tetap cukup konsisten di tahun 1970-an dan 1980-an, di lebih dari 50 persen untuk anak laki-laki dan 60 persen untuk anak perempuan. Anak putus sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan naik dari 22 persen pada 1976 menjadi sekitar 33 persen pada tahun 1983. Namun, perubahan yang nyata terjadi pada awal tahun 1980-an mengenai angka drop out postprimary: sedangkan anak laki-laki dan perempuan mempunyai tingkat yang relatif sama (14 persen) pada tahun 1975, oleh 1979.

Pakistan tidak pernah punya sistematis, terkoordinasi secara nasional upaya untuk meningkatkan pendidikan dasar. Hal ini pernah berasumsi bahwa alasan sekolah untuk perempuan rendah adalah karena budaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Departemen Pengembangan Perempuan dan sejumlah lembaga donor internasional pada tahun 1980 mengungkapkan bahwa bahaya bagi wanita kehormatan orangtua kekhawatiran paling penting. Memang, keengganan untuk menerima pendidikan bagi perempuan menoleh ke antusiasme ketika orangtua di pedesaan pedesaan Punjab dan Balochistan bisa dijamin anak perempuan mereka keselamatan dan, karenanya, untuk menghormati mereka.

Tingkat melek huruf berkisar antara 72,38% di Islamabad hingga 10,37% di Kabupaten Musakhel. Antara 2000-2004, Pakistan pada kelompok usia 55-64 memiliki tingkat melek huruf hampir 30%, mereka yang berusia antara 45-54 memiliki tingkat melek huruf hampir 40%, yang antara 25-34 memiliki tingkat melek huruf 50%, dan orang-orang berusia 15-24 memiliki tingkat melek lebih dari 60%. Data ini menunjukkan bahwa, dengan setiap generasi yang lewat, tingkat melek huruf di Pakistan telah meningkat sekitar 10%. Angka melek aksara bervariasi regional, khususnya dengan seks. Di daerah suku melek huruf perempuan adalah 3%.

Mahasiswa Asing Langka

Meskipun sistem pendidikan tinggi Pakistan membaik, kelemahan memacu persentase yang sangat besar mahasiswa Pakistan untuk belajar di luar negeri dan jumlah yang sangat kecil non-Pakistan untuk belajar di Pakistan, menurut beberapa sumber.

Pada tahun 2007, 24.617 warga Pakistan belajar di luar negeri dengan 9.307 siswa di Inggris dan 5.520 di AS UNCESO daftar 41 negara yang memiliki sedikitnya 1.000 mahasiswa dari negara lain belajar di negara mereka. Pakistan bukan salah satu dari mereka.

UNESCO melaporkan bahwa "mobilitas masuk" tinggi Tarif indikasi sistem pendidikan yang unggul, sedangkan sebaliknya adalah benar dari "mobilitas keluar" tinggi harga. Sementara siswa keluar Pakistan melebihi jumlah siswa inbound nya dengan rasio minimal 24:1, AS memiliki 50.265 mahasiswa outbound dan 595.874 siswa masuk.

Ada empat program untuk non-Pakistan yang ingin belajar di Pakistan, menurut [Kementerian Keuangan Pakistan](#). Program terbesar diluncurkan setelah laporan UNESCO 2007 dan bagi 1.000 warga Afghanistan tertarik Pertanian, Teknik dan Teknologi Informasi. Ada juga program untuk 300 mahasiswa dari Bangladesh dan Kashmir tertarik Kedokteran, Teknik dan Teknologi Informasi, dan beasiswa untuk 78 siswa budaya dari negara mana pun.

Biaya bukan alasan bahwa Pakistan lebih cenderung untuk belajar di luar negeri daripada non-Pakistan cenderung belajar di Pakistan. Bahkan, "Pendidikan dan Pertumbuhan Layanan" penulis Carl Dahlman, seorang profesor Amerika, mendesak Pakistan untuk membangun sekolah yang lebih berkualitas sehingga siswa tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang di luar negeri.

KESIMPULAN

Pakistan muncul sebagai negara Republik Islam pada tanggal 14 Agustus 1947 Negara Ini memiliki luas sekitar 796,095 Sq. Kilometer. Pakistan terdiri dari empat provinsi: Punjab, North West Frontier Provinsi, Balochistan dan Sindh dan beberapa unit penyatuan yang meliputi Islamabad Modal Wilayah (ICT), Wilayah Kesukuan Federal (FATA) dan Wilayah Utara (Fana).

Struktur sistem pendidikan formal Iran secara sederhana adalah: Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Indonesia hampir sama yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Pakistan wajib belajarnya hingga tingkat SLTA sementara di Indonesia hanya sampai tingkat SLTP. Sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama yakni adanya lembaga pendidikan Umum dan Agama/Madrasah serta sekolah tinggi/universitas baik umum dan keagamaan.

Problematisasi pendidikan yang terjadi di Pakistan adalah adanya senyalemen yang mengidentifikasi sebagian lembaga pendidikan Agama/ Madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris. Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasi hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Problematisasi lainnya yang hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah di Pakistan demikian pula halnya dengan di Indonesia, padahal ada undang-undang yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang-undang tersebut terbukti tidak adanya *punishment* bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing undang-undang wajib belajar baik di Pakistan dan demikian pula di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajid Thohir Pengantar Azyumardi Azra, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012).
- <http://abdulbarialhikmah.blogspot.co.id/>, di akses tanggal 12 April 2016.
- <http://ainazra.blogspot.co.id/2015/09/sistem-pendidikan-islam-di-pakistan-dan.html>, diakses tanggal 12 April 2016.
- <http://arhamjf.blogspot.co.id/2014/12/makalah-perbandingan-pendidikan-islam.html>, diakses tanggal 12 April 2016.
- <http://inmuchlis.blogspot.com/2012/02/perbandingan-pendidikan-di-negara.html/> Pada Tanggal 23 September 2013
- <http://i-saps.org/Publications/Info/18th%20Amendment%20pdf.pdf> , diakses tanggal 12 April 2016.
- <http://taqimsenjer-anakrantau.blogspot.com/2011/03/pendidikan-di-pakistan.html/> Pada Tanggal 23 September 2013
- <http://www.masterstudies.co.id/Pakistan/>, diakses tanggal 12 April 2016.
- Ishfaq Ahmad (1998-11-21). " *CERN and Pakistan: a personal perspective*". *CERN Courier*. Retrieved 2008-02-18.
- Katja Riikonen dalam Journal Pakistan Security Research Unit Brief No: 2 yang berjudul " *Sectarianism in Pakistan: A Destructive Way of Dealing with Difference*" hal: 3.
- Peter Blood, ed. (1994). " *Pakistan - Education*". *Pakistan: A Country Study*. GPO for the Library of Congress. Retrieved, 2010.
- Rasool Memon, Ghulam (2007). "Education in Pakistan: The Key Issues, Problems and The New Challenges". *Journal of Management and Social Sciences* **3** (1): 47–55. Retrieved 19 September 2011.
- Sayyid Husain Nasr, *Spiritualitas Islam*, terj, Mizan Bandung, 1993, Lihat Ajid Thohir.

Sohail Mahmood "*Islamic Fundamentalism in Pakistan, Egypt dan Iran*" (1995) cet: 1, Vanguard Books Islamabad, hal: 367. dan Dr. Uzma Anzar "*A Brief History of Madrasah*" (March, 2003).

UNESCO Institute for Statistics. "*Adjusted net enrolment ratio in primary education*". UNESCO. Retrieved, di akses tanggal 12 April 2016.

Uzma Anzar "*A brief history of Madrasah*" (March, 2003).